



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 /PMK.07/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : • 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disebut TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013.
- (2) TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 tidak termasuk untuk bulan ke-13 (ketiga belas).

Pasal 2

- (1) Alokasi TP Guru PNSD adalah sebesar Rp56.136.316.551.000,00 (lima puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)
- (2) Alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan kurang bayar TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.
- (3) Alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan sisa dana TP Guru PNSD yang masih terdapat di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tahun 2013.
- (4) Kurang bayar TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

- (5) Alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian alokasi TP Guru PNSD ditetapkan berdasarkan data kebutuhan TP Guru PNSD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil rekonsiliasi data Guru PNSD dengan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rincian alokasi TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) TP Guru PNSD merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- (2) TP Guru PNSD disediakan untuk daerah melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 atas beban Bagian Anggaran 999.05 (Sistem Akuntansi Transfer Ke Daerah).
- (3) TP Guru PNSD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- (4) TP Guru PNSD Tahun Anggaran sebelumnya yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah menjadi sumber pendanaan untuk pembayaran TP Guru PNSD

Pasal 4

- (1) Penyaluran TP Guru PNSD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara Triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I paling lambat minggu terakhir bulan April 2014;
 - b. Triwulan II paling lambat minggu terakhir bulan Juni 2014;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4

- c. Triwulan III paling lambat minggu terakhir bulan September 2014;
 - d. Triwulan IV paling lambat minggu terakhir bulan November 2014.
- (3) Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD setelah diterimanya TP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:
- a. Triwulan I paling lambat pada bulan April 2014;
 - b. Triwulan II paling lambat pada bulan Juli 2014;
 - c. Triwulan III paling lambat pada bulan Oktober 2014;
 - d. Triwulan IV paling lambat pada bulan Desember 2014.
- (2) Pembayaran TP Guru PNSD kepada masing-masing Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Daftar perhitungan pembayaran TP Guru PNSD dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal TP Guru PNSD yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tidak mencukupi kebutuhan pembayaran TP Guru PNSD, Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5

- (2) Dalam hal terdapat TP Guru PNSD setelah realisasi pembayaran TP Guru PNSD pada:
- Triwulan I, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan II;
 - Triwulan II, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan III; dan
 - Triwulan III, maka TP Guru PNSD tersebut menjadi penambah pagu pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV.
- (3) Dalam hal terdapat TP Guru PNSD setelah realisasi pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV dan terdapat kondisi sebagai berikut:
- seluruh Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD telah menerima pembayaran TP Guru PNSD; atau
 - Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD belum menerima pembayaran TP Guru PNSD baik sebagian maupun seluruhnya,
- maka TP Guru PNSD tersebut tidak disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Negara.
- (4) TP Guru PNSD yang tidak disetorkan sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut akan diperhitungkan dengan alokasi TP Guru PNSD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD secara semesteran kepada:
- Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
 - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
 - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar; dan
 - Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6

- (2) Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada:
 - a. minggu pertama bulan Agustus 2014 untuk Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester I; dan
 - b. minggu pertama bulan April 2015 untuk Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester II.
- (3) Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran TP Guru PNSD beserta jumlah total pembayarannya;
 - b. Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD beserta jumlah total kekurangan pembayarannya; dan
 - c. Rekapitulasi Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD per semester.
- (4) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Rekapitulasi Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD namun belum menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Format Rekapitulasi Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan melaksanakan rekonsiliasi data jumlah realisasi pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD pada tahun 2014.

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7

- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Laporan Realisasi Pembayaran TP Guru PNSD Semester I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (3) Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Gaji pokok Guru PNSD yang menjadi dasar pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014;
 - b. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima TP Guru PNSD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2014 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya;
 - c. Jumlah pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 dan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD dan telah menerima TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 beserta selisih kurang atau selisih lebih pembayarannya;
 - d. Perhitungan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) setelah pembayaran TP Guru PNSD Triwulan IV Tahun Anggaran 2013;
 - e. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014;
 - f. Jumlah Guru PNSD yang berhak mendapatkan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 namun belum menerima pembayaran TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 baik sebagian maupun seluruhnya beserta jumlah pembayarannya;
 - g. Perkiraan jumlah Guru PNSD yang berhak mendapat TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2015 beserta jumlah kebutuhan pembayarannya sampai dengan akhir tahun 2015; dan
 - h. Daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

8

- (4) Format perhitungan TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2013 di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format daftar rencana realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan rencana alokasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 10

Pemerintah Daerah penerima TP Guru PNSD yang tidak menyampaikan Laporan Realisasi TP Guru PNSD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi penundaan penyaluran TP Guru PNSD Triwulan II Tahun Anggaran 2015.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran TP Guru PNSD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

9

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 433

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
1	Provinsi Aceh							
2	Kab. Aceh Barat		212.283.103	17.478.179.000	17.690.462.000	17.690.462.000	17.690.462.000	70.549.565.000
3	Kab. Aceh Besar	11.465.033.080	14.603.116.750	23.601.539.000	26.739.623.000	26.739.623.000	26.739.623.000	103.820.408.000
4	Kab. Aceh Selatan	7.308.189.700	10.942.361.020	16.206.617.000	19.840.788.000	19.840.788.000	19.840.788.000	75.728.981.000
5	Kab. Aceh Singkil	758.450.500	491.378.159	7.472.223.000	7.205.151.000	7.205.151.000	7.205.151.000	29.087.676.000
6	Kab. Aceh Tengah	5.569.408.420	6.505.572.220	14.680.145.000	15.616.309.000	15.616.309.000	15.616.309.000	61.529.072.000
7	Kab. Aceh Tenggara	548.204.621	3.329.791.501	8.540.301.000	11.321.888.000	11.321.888.000	11.321.888.000	42.505.965.000
8	Kab. Aceh Timur	452.517.792	6.256.148.500	12.975.005.000	18.778.635.000	18.778.635.000	18.778.635.000	69.310.910.000
9	Kab. Aceh Utara	9.491.596.100	13.269.511.460	30.535.032.000	34.312.948.000	34.312.948.000	34.312.948.000	133.473.876.000
10	Kab. Bireun	14.004.765.820	13.791.704.680	32.356.932.000	32.143.871.000	32.143.871.000	32.143.871.000	128.788.545.000
11	Kab. Pidie	13.033.288.400	21.091.420.830	23.802.277.000	31.860.410.000	31.860.410.000	31.860.410.000	119.383.507.000
12	Kab. Simeulue		603.165.464	7.671.013.000	8.274.179.000	8.274.179.000	8.274.179.000	32.493.550.000
13	Kota Banda Aceh	12.570.313.299	20.785.400.074	22.571.564.000	30.786.650.000	30.786.650.000	30.786.650.000	114.931.514.000
14	Kota Sabang		1.707.621.199	3.667.097.000	5.374.719.000	5.374.719.000	5.374.719.000	19.791.254.000
15	Kota Langsa	5.983.961.400	5.753.858.830	17.877.655.000	17.647.552.000	17.647.552.000	17.647.552.000	70.820.311.000
16	Kota Lhokseumawe	78.229.200	318.618.273	16.456.701.000	16.697.090.000	16.697.090.000	16.697.090.000	66.547.971.000
17	Kab. Gayo Lues	2.924.111.000	1.816.735.585	8.610.550.000	7.503.174.000	7.503.174.000	7.503.174.000	31.120.072.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	4.562.107.380	5.706.126.895	13.356.267.000	14.500.287.000	14.500.287.000	14.500.287.000	56.857.128.000
19	Kab. Aceh Jaya	123.386.117	10.869.718.680	-	2.723.808.000	6.903.447.000	6.903.447.000	16.530.702.000

5



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
								(dalam rupiah)
20	Kab. Nagan Raya	6.656.704.500	2.482.804.640	15.021.651.000	10.847.752.000	10.847.752.000	10.847.752.000	47.564.907.000
21	Kab. Aceh Tamiang	6.094.787.400	8.931.999.750	13.503.891.000	16.341.104.000	16.341.104.000	16.341.104.000	62.527.203.000
22	Kab. Bener Meriah	3.371.609.600	5.737.916.040	7.838.927.000	10.205.234.000	10.205.234.000	10.205.234.000	38.454.629.000
23	Kab. Pidie Jaya	17.996.958.600	2.659.724.940	28.587.907.000	13.250.673.000	13.250.673.000	13.250.673.000	68.339.926.000
24	Kota Subulussalam	-	1.545.575.840	2.838.987.000	4.384.562.000	4.384.562.000	4.384.562.000	15.992.673.000
25	Provinsi Sumatera Utara							
26	Kab. Asahan	9.088.669.600	3.846.282.370	41.728.255.000	36.485.868.000	36.485.868.000	36.485.868.000	151.185.859.000
27	Kab. Dairi	3.346.611.500	7.504.662.800	16.496.634.000	20.654.685.000	20.654.685.000	20.654.685.000	78.460.689.000
28	Kab. Deli Serdang	22.808.062.300	23.074.032.817	76.620.517.000	76.886.488.000	76.886.488.000	76.886.488.000	307.279.981.000
29	Kab. Tanah Karo	184.307.800	4.054.634.468	24.929.572.000	28.799.904.000	28.799.904.000	28.799.904.000	111.329.290.000
30	Kab. Labuhan Batu	3.739.282.940	2.095.842.531	20.960.416.000	19.316.975.000	19.316.975.000	19.316.975.000	78.911.341.000
31	Kab. Langkat	22.127.675.090	10.285.503.970	62.905.533.000	51.063.362.000	51.063.362.000	51.063.362.000	216.095.619.000
32	Kab. Mandailing Natal	174.512.400	10.567.070.290	16.031.913.000	26.424.470.000	26.424.470.000	26.424.470.000	95.305.323.000
33	Kab. Nias	-	9.923.281.288	-	-	3.965.334.000	4.745.277.000	8.710.611.000
34	Kab. Simalungun	9.158.446.300	12.456.813.420	52.716.979.000	56.015.347.000	56.015.347.000	56.015.347.000	220.763.020.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	-	11.315.449.840	4.346.500.000	15.661.950.000	15.661.950.000	15.661.950.000	51.332.350.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	259.772.160	4.414.656.560	15.168.923.000	19.323.808.000	19.323.808.000	19.323.808.000	73.140.347.000
37	Kab. Tapanuli Utara	-	6.102.873.820	21.233.760.000	27.336.634.000	27.336.634.000	27.336.634.000	103.243.662.000

4



LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
38	Kab. Toba Samosir	-	4.057.857.889	26.633.120.000	30.690.978.000	30.690.978.000	30.690.978.000	118.706.054.000
39	Kota Binjai	4.443.780.700	8.452.780.400	23.010.358.000	27.019.358.000	27.019.358.000	27.019.358.000	104.068.432.000
40	Kota Medan	-	35.372.908.103	63.121.479.000	98.494.387.000	98.494.387.000	98.494.387.000	358.604.640.000
41	Kota Pematang Siantar	56.341.200	387.575.980	35.628.773.000	35.960.008.000	35.960.008.000	35.960.008.000	143.508.797.000
42	Kota Sibolga	-	395.667.200	12.488.975.000	12.884.642.000	12.884.642.000	12.884.642.000	51.142.901.000
43	Kota Tanjung Balai	3.468.384.900	1.409.839.340	13.188.677.000	11.130.131.000	11.130.131.000	11.130.131.000	46.579.070.000
44	Kota Tebing Tinggi	43.772.300	3.105.585.516	14.824.331.000	17.886.144.000	17.886.144.000	17.886.144.000	68.482.763.000
45	Kota Padang Sidempuan	3.878.705.200	6.802.354.590	17.320.024.000	20.243.674.000	20.243.674.000	20.243.674.000	78.051.046.000
46	Kab. Pakpak Bharat	24.273.200	3.403.328.820	10.614.348.000	13.993.404.000	13.993.404.000	13.993.404.000	52.594.560.000
47	Kab. Nias Selatan	3.094.891.200	(1.119.879.502)	16.043.830.000	11.829.060.000	11.829.060.000	11.829.060.000	51.531.010.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	3.185.650.260	10.623.348.980	14.444.415.000	21.882.113.000	21.882.113.000	21.882.113.000	80.090.754.000
49	Kab. Serdang Bedagai	6.897.787.900	8.534.475.490	31.426.248.000	33.062.935.000	33.062.935.000	33.062.935.000	130.615.053.000
50	Kab. Samosir	589.728.400	4.057.857.889	10.218.555.000	13.686.684.000	13.686.684.000	13.686.684.000	51.278.607.000
51	Kab. Batubara	3.720.376.600	3.441.903.460	20.713.114.000	20.434.641.000	20.434.641.000	20.434.641.000	82.017.037.000
52	Kab. Padang Lawas	-	4.885.511.786	5.843.091.000	10.728.603.000	10.728.603.000	10.728.603.000	38.028.900.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	-	3.252.789.700	6.015.453.000	9.268.243.000	9.268.243.000	9.268.243.000	33.820.182.000
54	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	4.321.513.801	8.029.507.000	12.351.020.000	12.351.020.000	12.351.020.000	45.082.567.000
55	Kab. Labuhan Batu Utara	2.708.567.449	2.217.055.432	16.571.165.000	16.079.653.000	16.079.653.000	16.079.653.000	64.810.124.000
56	Kab. Nias Utara	-	3.111.627.908	2.261.681.000	5.373.308.000	5.373.308.000	5.373.308.000	18.381.605.000



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
57	Kab. Nias Barat	416.455.000	1.163.696.926	5.382.760.000	6.130.002.000	6.130.002.000	6.130.002.000	23.772.766.000
58	Kota Gunung Sitoli	1.582.479.200	4.588.590.000	8.991.519.000	11.997.630.000	11.997.630.000	11.997.630.000	44.984.409.000
59	Provinsi Sumatera Barat							
60	Kab. Limapuluh Kota	7.157.765.107	14.320.646.542	27.975.987.000	35.138.868.000	35.138.868.000	35.138.868.000	133.392.591.000
61	Kab. Agam	13.219.369.179	28.231.960.975	31.112.745.000	46.125.336.000	46.125.336.000	46.125.336.000	169.488.753.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	36.640.860	14.578.666.660	-	-	-	3.856.074.000	3.856.074.000
63	Kab. Padang Pariaman	14.551.448.400	13.518.271.645	39.184.432.000	38.151.256.000	38.151.256.000	38.151.256.000	153.638.200.000
64	Kab. Pasaman	283.234.241	3.656.186.228	21.871.322.000	25.244.274.000	25.244.274.000	25.244.274.000	97.604.144.000
65	Kab. Pesisir Selatan	16.443.320.400	20.888.978.394	31.193.372.000	35.639.030.000	35.639.030.000	35.639.030.000	138.110.462.000
66	Kab. Sijunjung	6.105.145.080	11.239.404.720	11.611.132.000	16.745.391.000	16.745.391.000	16.745.391.000	61.847.305.000
67	Kab. Solok	15.755.811.724	15.694.180.265	33.679.650.000	33.618.019.000	33.618.019.000	33.618.019.000	134.533.707.000
68	Kab. Tanah Datar	6.835.289.500	26.594.593.800	19.045.014.000	38.804.318.000	38.804.318.000	38.804.318.000	135.457.968.000
69	Kota Bukit Tinggi	3.280.705.600	8.837.711.680	11.037.660.000	16.594.666.000	16.594.666.000	16.594.666.000	60.821.658.000
70	Kota Padang Panjang	2.432.134.600	7.667.833.580	3.518.567.000	8.754.266.000	8.754.266.000	8.754.266.000	29.781.365.000
71	Kota Padang	17.921.960.465	-	94.204.177.000	76.282.216.000	76.282.216.000	76.282.216.000	323.050.825.000
72	Kota Payakumbuh	3.723.701.235	9.849.043.920	10.222.992.000	16.348.334.000	16.348.334.000	16.348.334.000	59.267.994.000
73	Kota Sawahlunto	156.823.400	8.175.756.100	2.579.607.000	10.598.540.000	10.598.540.000	10.598.540.000	34.375.227.000
74	Kota Solok	189.977.700	7.759.793.320	4.095.362.000	11.665.177.000	11.665.177.000	11.665.177.000	39.090.893.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 5 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
75	Kota Pariaman	2.858.086.180	6.577.880.028	20.350.249.000	24.070.043.000	24.070.043.000	24.070.043.000	92.560.378.000
76	Kab. Pasaman Barat	15.094.197.000	7.318.270.063	28.700.249.000	20.924.322.000	20.924.322.000	20.924.322.000	91.473.215.000
77	Kab. Dharmasraya	1.373.140.320	7.800.728.940	7.924.123.000	14.351.712.000	14.351.712.000	14.351.712.000	50.979.259.000
78	Kab. Solok Selatan	4.393.364.600	4.990.539.380	11.902.167.000	12.499.342.000	12.499.342.000	12.499.342.000	49.400.193.000
79	Provinsi Riau							
80	Kab. Bengkalis	8.420.158.100	15.235.633.430	18.637.412.000	25.452.887.000	25.452.887.000	25.452.887.000	94.996.073.000
81	Kab. Indragiri Hilir	5.619.047.260	10.964.004.459	17.003.268.000	22.348.225.000	22.348.225.000	22.348.225.000	84.047.943.000
82	Kab. Indragiri Hulu	10.875.734.700	7.294.265.400	31.916.490.000	28.335.021.000	28.335.021.000	28.335.021.000	116.921.553.000
83	Kab. Kampar	7.509.311.800	21.337.793.400	25.790.124.000	39.618.605.000	39.618.605.000	39.618.605.000	144.645.939.000
84	Kab. Kuantan Singingi	9.575.520.300	10.516.716.770	22.172.405.000	23.113.601.000	23.113.601.000	23.113.601.000	91.513.208.000
85	Kab. Pelalawan		5.275.436.243	8.723.631.000	13.999.067.000	13.999.067.000	13.999.067.000	50.720.832.000
86	Kab. Rokan Hilir	1.719.601.980	8.794.612.840	5.293.994.000	12.369.005.000	12.369.005.000	12.369.005.000	42.401.009.000
87	Kab. Rokan Hulu	8.068.933.540	12.549.083.574	14.074.900.000	18.555.050.000	18.555.050.000	18.555.050.000	69.740.050.000
88	Kab. Siak	6.119.633.700	6.748.359.560	15.902.334.000	16.531.060.000	16.531.060.000	16.531.060.000	65.495.514.000
89	Kota Dumai	6.162.007.653	7.872.189.250	16.174.914.000	17.885.095.000	17.885.095.000	17.885.095.000	69.830.199.000
90	Kota Pekanbaru	22.874.014.480	21.745.459.120	49.298.850.000	48.170.295.000	48.170.295.000	48.170.295.000	193.809.735.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	36.370.800	6.103.499.329	5.029.858.000	11.096.987.000	11.096.987.000	11.096.987.000	38.320.819.000



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK-07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam rupiah)							JUMLAH
NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	
92	Provinsi Kepulauan Riau						
93	Kab. Natuna	-	2.776.225.420	14.994.530.000	17.770.756.000	17.770.756.000	68.306.798.000
94	Kab. Kepulauan Anambas	-	2.121.768.200	368.198.000	2.489.966.000	2.489.966.000	7.838.096.000
95	Kab. Karimun	-	6.339.206.340	10.354.115.000	16.693.322.000	16.693.322.000	60.434.081.000
96	Kota Batam	2.776.163.492	7.131.403.160	10.812.342.000	15.167.581.000	15.167.581.000	56.315.085.000
97	Kota Tanjung Pinang	3.837.508.200	4.190.472.000	13.256.709.000	13.609.673.000	13.609.673.000	54.085.728.000
98	Kab. Lingga	225.313.200	2.605.320.464	5.866.659.000	8.246.667.000	8.246.667.000	30.606.660.000
99	Kab. Bintan	2.585.430.700	600.048.800	13.085.584.000	11.100.202.000	11.100.202.000	46.386.190.000
100	Provinsi Jambi						
101	Kab. Batanghari	3.187.642.300	2.184.675.900	17.394.361.000	16.391.394.000	16.391.394.000	66.568.543.000
102	Kab. Bungo	11.889.590.589	15.168.763.039	18.700.220.000	21.979.393.000	21.979.393.000	84.638.399.000
103	Kab. Kerinci	8.372.457.096	13.369.480.575	16.484.535.000	21.481.558.000	21.481.558.000	80.929.209.000
104	Kab. Merangin	18.354.655.500	8.562.253.100	30.171.232.000	20.378.830.000	20.378.830.000	91.307.722.000
105	Kab. Muaro Jambi	5.222.366.700	5.793.193.399	19.522.995.000	20.093.822.000	20.093.822.000	79.804.461.000
106	Kab. Sarolangun	192.484.300	13.967.286.032	3.885.904.000	17.660.706.000	17.660.706.000	56.868.022.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.481.177.540	5.565.202.881	11.480.218.000	14.564.244.000	14.564.244.000	55.172.950.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.179.528.600	3.146.350.437	15.154.758.000	16.121.580.000	16.121.580.000	63.519.498.000
109	Kab. Tebo	-	4.171.677.760	14.227.154.000	18.398.832.000	18.398.832.000	69.423.650.000

47



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 7 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
110	Kota Jambi	21.895.916.398	28.421.928.627	31.784.018.000	38.310.030.000	38.310.030.000	38.310.030.000	146.714.108.000
111	Kota Sungai Penuh	6.285.877.198	7.042.517.972	14.970.435.000	15.727.076.000	15.727.076.000	15.727.076.000	62.151.663.000
112	Provinsi Sumatera Selatan							
113	Kab. Lahat	36.325.015	4.495.904.100	23.309.115.000	27.768.695.000	27.768.695.000	27.768.695.000	106.615.200.000
114	Kab. Musi Banyuasin	-	2.453.943.940	16.979.507.000	19.433.451.000	19.433.451.000	19.433.451.000	75.279.860.000
115	Kab. Musi Rawas	-	12.510.415.740	2.006.464.000	14.516.890.000	14.516.890.000	14.516.890.000	45.557.104.000
116	Kab. Muara Enim	6.906.006.981	11.081.493.246	23.554.255.000	27.729.741.000	27.729.741.000	27.729.741.000	106.743.478.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	-	1.503.698.405	23.790.916.000	25.294.614.000	25.294.614.000	25.294.614.000	99.674.758.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	-	10.559.392.580	7.551.635.000	18.111.027.000	18.111.027.000	18.111.027.000	61.884.716.000
119	Kota Palembang	21.666.602.070	47.738.825.754	79.909.081.000	105.981.305.000	105.981.305.000	105.981.305.000	397.852.996.000
120	Kota Prabumulih	-	7.891.024.730	4.031.373.000	11.922.398.000	11.922.398.000	11.922.398.000	39.798.567.000
121	Kota Pagar Alam	2.136.497.230	2.814.232.480	9.126.531.000	9.804.266.000	9.804.266.000	9.804.266.000	38.539.329.000
122	Kota Lubuk Linggau	-	5.458.087.080	9.961.443.000	15.419.530.000	15.419.530.000	15.419.530.000	56.220.033.000
123	Kab. Banyuasin	5.583.603.503	8.778.614.350	25.169.646.000	28.364.657.000	28.364.657.000	28.364.657.000	110.263.617.000
124	Kab. Ogan Ilir	-	12.652.065.340	7.711.609.000	20.363.675.000	20.363.675.000	20.363.675.000	68.802.634.000
125	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	3.711.679.065	28.267.650.000	31.979.329.000	31.979.329.000	31.979.329.000	124.205.637.000
126	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	36.158.400	4.332.691.799	4.621.932.000	8.918.466.000	8.918.466.000	8.918.466.000	31.377.330.000
127	Kab. Empat Lawang	-	4.638.563.800	7.157.241.000	11.795.804.000	11.795.804.000	11.795.804.000	42.544.653.000

9



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
128	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	3.846.325.000	3.846.325.000	3.846.325.000	3.846.325.000	15.385.300.000
129	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	3.043.243.000	3.043.243.000	3.043.243.000	3.043.243.000	12.172.972.000
130	Provinsi Bangka Belitung							-
131	Kab. Bangka	2.574.904.827	5.145.046.800	12.701.677.000	15.271.819.000	15.271.819.000	15.271.819.000	58.517.134.000
132	Kab. Belitung	3.874.413.130	6.266.345.220	22.789.434.000	25.181.366.000	25.181.366.000	25.181.366.000	98.333.532.000
133	Kota Pangkal Pinang	4.946.693.590	4.980.712.700	18.012.558.000	18.046.577.000	18.046.577.000	18.046.577.000	72.152.289.000
134	Kab. Bangka Selatan	408.662.600	1.986.366.650	6.340.117.000	7.917.821.000	7.917.821.000	7.917.821.000	30.093.580.000
135	Kab. Bangka Tengah	1.041.341.770	2.066.390.580	19.806.645.000	20.831.694.000	20.831.694.000	20.831.694.000	82.301.727.000
136	Kab. Bangka Barat	1.318.147.745	2.237.320.225	11.436.655.000	12.355.828.000	12.355.828.000	12.355.828.000	48.504.139.000
137	Kab. Belitung Timur	2.400.822.600	3.948.128.740	9.218.203.000	10.765.509.000	10.765.509.000	10.765.509.000	41.514.730.000
138	Provinsi Bengkulu							-
139	Kab. Bengkulu Selatan	7.028.102.400	8.487.454.160	17.675.818.000	19.135.169.000	19.135.169.000	19.135.169.000	75.081.325.000
140	Kab. Bengkulu Utara	10.613.661.200	8.230.704.130	22.336.950.000	19.953.993.000	19.953.993.000	19.953.993.000	82.198.929.000
141	Kab. Rejang Lebong	7.166.345.880	7.203.400.500	25.454.099.000	25.491.154.000	25.491.154.000	25.491.154.000	101.927.561.000
142	Kota Bengkulu	13.834.046.200	10.280.125.335	43.523.295.000	39.969.374.000	39.969.374.000	39.969.374.000	163.431.417.000
143	Kab. Kaur	3.391.927.700	2.264.200.334	9.830.072.000	8.702.345.000	8.702.345.000	8.702.345.000	35.937.107.000
144	Kab. Seluma	7.555.049.028	5.290.958.212	14.448.699.000	12.184.609.000	12.184.609.000	12.184.609.000	51.002.526.000

u



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 9 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
145	Kab. Mukomuko	1.739.743.156	3.414.840.880	12.899.173.000	14.574.270.000	14.574.270.000	14.574.270.000	56.621.983.000
146	Kab. Lebong	-	4.051.951.628	8.419.067.000	12.471.018.000	12.471.018.000	12.471.018.000	45.832.121.000
147	Kab. Kepahiang	303.750.550	6.520.610.020	6.311.498.000	12.528.358.000	12.528.358.000	12.528.358.000	43.896.572.000
148	Kab. Bengkulu Tengah	5.990.485.960	4.871.815.265	11.909.557.000	10.790.886.000	10.790.886.000	10.790.886.000	44.282.215.000
149	Provinsi Lampung	-	-	-	-	-	-	-
150	Kab. Lampung Barat	4.227.839.800	9.905.280.150	8.817.471.000	14.494.912.000	14.494.912.000	14.494.912.000	52.302.207.000
151	Kab. Lampung Selatan	16.619.436.320	18.835.549.385	38.444.577.000	40.660.690.000	40.660.690.000	40.660.690.000	160.426.647.000
152	Kab. Lampung Tengah	14.720.780.280	48.672.921.535	37.167.317.000	71.119.459.000	71.119.459.000	71.119.459.000	250.525.694.000
153	Kab. Lampung Utara	-	-	46.149.781.000	46.149.781.000	46.149.781.000	46.149.781.000	184.599.124.000
154	Kab. Lampung Timur	38.941.700	4.049.810.760	57.820.657.000	61.831.526.000	61.831.526.000	61.831.526.000	243.315.235.000
155	Kab. Tanggamus	12.395.551.100	16.657.701.690	27.044.832.000	31.306.982.000	31.306.982.000	31.306.982.000	120.965.778.000
156	Kab. Tulang Bawang	98.950.200	6.904.488.249	8.868.604.000	15.674.142.000	15.674.142.000	15.674.142.000	55.891.030.000
157	Kab. Way Kanan	15.323.680	8.061.614.820	12.200.321.000	20.246.612.000	20.246.612.000	20.246.612.000	72.940.157.000
158	Kota Bandar Lampung	-	6.719.867.380	57.502.673.000	64.222.540.000	64.222.540.000	64.222.540.000	250.170.293.000
159	Kota Metro	8.593.128.200	11.391.398.330	16.528.229.000	19.326.499.000	19.326.499.000	19.326.499.000	74.507.726.000
160	Kab. Pesawaran	10.334.630.360	9.847.972.350	24.604.926.000	24.118.268.000	24.118.268.000	24.118.268.000	96.959.730.000
161	Kab. Pringsewu	22.415.031.480	14.813.910.485	43.209.152.000	35.608.031.000	35.608.031.000	35.608.031.000	150.033.245.000
162	Kab. Mesuji	-	1.881.376.416	7.034.104.000	8.915.481.000	8.915.481.000	8.915.481.000	33.780.547.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
163	Kab. Tulang Bawang Barat	2.996.932.500	5.690.280.070	12.102.519.000	14.795.867.000	14.795.867.000	14.795.867.000	56.490.120.000
164	Kab. Pesisir Barat	-	-	8.776.723.000	8.776.723.000	8.776.723.000	8.776.723.000	35.106.892.000
165	Provinsi DKI Jakarta	163.082.365.755	219.070.077.705	401.378.716.000	457.366.428.000	457.366.428.000	457.366.428.000	1.773.478.000.000
166	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
167	Kab. Bandung	55.011.887.450	29.937.133.230	149.757.104.000	124.682.350.000	124.682.350.000	124.682.350.000	523.804.154.000
168	Kab. Bekasi	10.495.468.700	10.872.401.802	61.551.126.000	61.928.059.000	61.928.059.000	61.928.059.000	247.335.303.000
169	Kab. Bogor	51.002.246.100	41.667.736.967	124.282.523.000	114.948.014.000	114.948.014.000	114.948.014.000	469.126.565.000
170	Kab. Ciamis	68.125.018.840	63.805.768.540	79.504.022.000	75.184.772.000	75.184.772.000	75.184.772.000	305.058.338.000
171	Kab. Cianjur	58.895.817.310	51.881.574.810	93.522.628.000	86.508.385.000	86.508.385.000	86.508.385.000	353.047.783.000
172	Kab. Cirebon	33.524.135.010	17.822.981.633	105.869.353.000	90.168.199.000	90.168.199.000	90.168.199.000	376.373.950.000
173	Kab. Garut	48.557.628.390	36.174.985.740	133.369.428.000	120.986.785.000	120.986.785.000	120.986.785.000	496.329.783.000
174	Kab. Indramayu	22.997.277.260	12.526.299.800	81.482.700.000	71.011.723.000	71.011.723.000	71.011.723.000	294.517.869.000
175	Kab. Karawang	29.574.911.400	16.717.142.560	99.800.467.000	86.942.698.000	86.942.698.000	86.942.698.000	360.628.561.000
176	Kab. Kuningan	25.479.586.200	8.243.256.736	86.792.892.000	69.556.563.000	69.556.563.000	69.556.563.000	295.462.581.000
177	Kab. Majalengka	26.925.499.180	17.524.731.300	77.040.243.000	67.639.475.000	67.639.475.000	67.639.475.000	279.958.668.000
178	Kab. Purwakarta	19.702.481.200	19.417.597.933	48.306.185.000	48.021.302.000	48.021.302.000	48.021.302.000	192.370.091.000
179	Kab. Subang	27.898.263.460	17.563.087.900	86.010.086.000	75.674.910.000	75.674.910.000	75.674.910.000	313.034.816.000

(dalam rupiah)

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 11 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
180	Kab. Sukabumi	35.018.804.500	29.286.104.241	88.951.997.000	83.219.297.000	83.219.297.000	83.219.297.000	338.609.888.000
181	Kab. Sumedang	33.212.282.800	29.627.582.577	67.568.000.000	63.983.299.000	63.983.299.000	63.983.299.000	259.517.897.000
182	Kab. Tasikmalaya	40.779.770.520	34.729.197.070	107.322.343.000	101.271.770.000	101.271.770.000	101.271.770.000	411.137.653.000
183	Kota Bandung	68.856.803.810	67.661.072.625	126.462.909.000	125.267.177.000	125.267.177.000	125.267.177.000	502.264.440.000
184	Kota Bekasi	30.083.147.300	23.229.420.111	68.147.383.000	61.293.656.000	61.293.656.000	61.293.656.000	252.028.351.000
185	Kota Bogor	14.933.010.789	41.667.736.967	19.073.845.000	45.808.572.000	45.808.572.000	45.808.572.000	156.499.561.000
186	Kota Cirebon	11.265.327.400	7.637.100.475	40.676.162.000	37.047.935.000	37.047.935.000	37.047.935.000	151.819.967.000
187	Kota Depok	10.664.647.800	21.683.201.050	35.225.098.000	46.243.651.000	46.243.651.000	46.243.651.000	173.956.051.000
188	Kota Sukabumi	10.061.647.900	4.614.449.871	28.065.231.000	22.618.033.000	22.618.033.000	22.618.033.000	95.919.330.000
189	Kota Tasikmalaya	24.242.293.303	7.245.556.620	68.522.051.000	51.525.314.000	51.525.314.000	51.525.314.000	223.097.993.000
190	Kota Cimahi	13.516.093.900	9.915.200.182	38.075.921.000	34.475.027.000	34.475.027.000	34.475.027.000	141.501.002.000
191	Kota Banjar	4.424.439.920	6.627.931.720	17.800.497.000	20.003.989.000	20.003.989.000	20.003.989.000	77.812.464.000
192	Kab. Bandung Barat	32.925.879.400	13.849.514.021	81.007.339.000	61.930.974.000	61.930.974.000	61.930.974.000	266.800.261.000
193	Kab. Pangandaran	-	-	35.125.481.000	35.125.481.000	35.125.481.000	35.125.481.000	140.501.924.000
194	Provinsi Banten	-	-	-	-	-	-	-
195	Kab. Lebak	22.419.604.800	15.307.999.590	59.547.621.000	52.436.016.000	52.436.016.000	52.436.016.000	216.855.669.000
196	Kab. Pandeglang	25.913.080.700	21.929.288.280	61.207.295.000	57.223.503.000	57.223.503.000	57.223.503.000	232.877.804.000
197	Kab. Serang	15.041.479.900	20.724.418.000	43.798.127.000	49.481.065.000	49.481.065.000	49.481.065.000	192.241.322.000

5



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
								(dalam rupiah)
198	Kab. Tangerang	12.721.818.040	30.448.779.184	40.849.090.000	58.576.051.000	58.576.051.000	58.576.051.000	216.577.243.000
199	Kota Cilegon	3.209.567.820	6.083.751.010	33.328.300.000	36.202.483.000	36.202.483.000	36.202.483.000	141.935.749.000
200	Kota Tangerang	20.581.294.600	20.162.713.733	53.966.081.000	53.547.501.000	53.547.501.000	53.547.501.000	214.608.584.000
201	Kota Serang	11.316.880.305	14.820.591.276	25.784.002.000	29.287.713.000	29.287.713.000	29.287.713.000	113.647.141.000
202	Kota Tangerang Selatan	10.390.472.900	19.967.974.880	19.895.016.000	29.472.518.000	29.472.518.000	29.472.518.000	108.312.570.000
203	Provinsi Jawa Tengah							
204	Kab. Banjarnegara	24.255.486.300	48.121.286.345	34.381.065.000	58.246.865.000	58.246.865.000	58.246.865.000	209.121.660.000
205	Kab. Banyumas	20.131.978.600	50.550.458.261	56.516.101.000	86.934.581.000	86.934.581.000	86.934.581.000	317.319.844.000
206	Kab. Batang	15.236.017.200	30.819.366.730	29.518.544.000	45.101.893.000	45.101.893.000	45.101.893.000	164.824.223.000
207	Kab. Blora	15.069.566.000	24.780.982.544	54.440.529.000	64.151.946.000	64.151.946.000	64.151.946.000	246.896.367.000
208	Kab. Boyolali	28.974.096.400	47.844.551.900	50.542.879.000	69.413.335.000	69.413.335.000	69.413.335.000	258.782.884.000
209	Kab. Brebes	11.572.200	65.572.500.089	6.663.166.000	72.224.094.000	72.224.094.000	72.224.094.000	223.335.448.000
210	Kab. Cilacap	15.934.323.300	45.066.800.145	56.983.784.000	86.116.261.000	86.116.261.000	86.116.261.000	315.332.567.000
211	Kab. Demak	21.758.696.600	29.207.115.471	43.458.611.000	50.907.030.000	50.907.030.000	50.907.030.000	196.179.701.000
212	Kab. Grobogan	10.460.300.634	34.823.333.095	36.437.558.000	60.800.591.000	60.800.591.000	60.800.591.000	218.839.331.000
213	Kab. Jepara	-	11.623.051.951	28.833.202.000	40.456.254.000	40.456.254.000	40.456.254.000	150.201.964.000
214	Kab. Karanganyar	26.753.547.160	40.649.686.865	52.798.658.000	66.694.798.000	66.694.798.000	66.694.798.000	252.883.052.000
215	Kab. Kebumen	12.605.356.447	20.355.884.755	61.533.423.000	69.283.952.000	69.283.952.000	69.283.952.000	269.385.279.000



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
216	Kab. Kendal	10.871.924.640	26.976.601.983	41.742.172.000	57.846.849.000	57.846.849.000	57.846.849.000	215.282.719.000
217	Kab. Klaten	38.831.418.300	83.713.640.130	43.188.522.000	88.070.743.000	88.070.743.000	88.070.743.000	307.400.751.000
218	Kab. Kudus	14.531.946.100	15.562.526.272	41.152.066.000	42.182.647.000	42.182.647.000	42.182.647.000	167.700.007.000
219	Kab. Magelang	9.304.947.200	27.006.210.012	42.157.083.000	59.858.346.000	59.858.346.000	59.858.346.000	221.732.121.000
220	Kab. Pati	30.579.681.860	40.337.894.870	61.708.688.000	71.466.891.000	71.466.891.000	71.466.891.000	276.109.361.000
221	Kab. Pekalongan	29.719.344	11.183.124.000	39.788.426.000	50.941.830.000	50.941.830.000	50.941.830.000	192.613.916.000
222	Kab. Pemalang	12.583.472.700	37.829.818.700	40.620.844.000	65.867.190.000	65.867.190.000	65.867.190.000	238.222.414.000
223	Kab. Purbalingga	15.998.173.120	24.305.841.195	37.072.025.000	45.379.694.000	45.379.694.000	45.379.694.000	173.211.107.000
224	Kab. Purworejo	14.451.616.427	37.226.212.127	34.401.489.000	57.176.084.000	57.176.084.000	57.176.084.000	205.929.741.000
225	Kab. Rembang	16.774.111.300	25.628.134.350	51.563.729.000	60.417.752.000	60.417.752.000	60.417.752.000	232.816.985.000
226	Kab. Semarang	11.045.559.718	32.711.859.022	26.202.415.000	47.868.715.000	47.868.715.000	47.868.715.000	169.808.560.000
227	Kab. Sragen	28.056.137.040	52.397.548.491	47.577.240.000	71.918.651.000	71.918.651.000	71.918.651.000	263.333.193.000
228	Kab. Sukoharjo	22.298.920.136	27.961.144.907	47.492.869.000	53.155.094.000	53.155.094.000	53.155.094.000	206.958.151.000
229	Kab. Tegal	22.665.620.360	20.470.479.377	61.121.875.000	58.926.734.000	58.926.734.000	58.926.734.000	237.902.077.000
230	Kab. Temanggung	1.596.598.099	6.765.172.360	49.794.872.000	54.963.446.000	54.963.446.000	54.963.446.000	214.685.210.000
231	Kab. Wonogiri	15.174.497.200	48.102.702.780	51.730.851.000	84.659.057.000	84.659.057.000	84.659.057.000	305.708.022.000
232	Kab. Wonosobo	10.325.738.900	14.640.239.960	38.751.440.000	43.065.941.000	43.065.941.000	43.065.941.000	167.949.263.000
233	Kota Magelang	10.772.649.400	13.868.510.820	16.324.649.000	19.420.510.000	19.420.510.000	19.420.510.000	74.586.179.000
234	Kota Pekalongan	4.018.435.600	11.471.219.795	17.388.223.000	24.841.007.000	24.841.007.000	24.841.007.000	91.911.244.000



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
								(dalam rupiah)
235	Kota Salatiga	-	8.385.947.460	12.070.606.000	20.456.553.000	20.456.553.000	20.456.553.000	73.440.265.000
236	Kota Semarang	15.827.908.900	45.205.450.586	48.946.219.000	78.323.760.000	78.323.760.000	78.323.760.000	283.917.499.000
237	Kota Surakarta	43.552.800	18.405.064.755	38.138.493.000	56.500.005.000	56.500.005.000	56.500.005.000	207.638.508.000
238	Kota Tegal	9.236.701.600	10.440.869.030	18.891.736.000	20.095.903.000	20.095.903.000	20.095.903.000	79.179.445.000
239	Provinsi DI Yogyakarta							-
240	Kab. Bantul	17.399.230.300	48.968.620.264	41.477.389.000	73.046.779.000	73.046.779.000	73.046.779.000	260.617.726.000
241	Kab. Gunung Kidul	6.591.021.165	37.176.460.250	26.324.668.000	56.910.107.000	56.910.107.000	56.910.107.000	197.054.989.000
242	Kab. Kulon Progo	1.747.800.600	27.921.699.100	23.602.025.000	49.775.924.000	49.775.924.000	49.775.924.000	172.929.797.000
243	Kab. Sleman	412.605.060	45.464.807.480	28.406.649.000	73.458.852.000	73.458.852.000	73.458.852.000	248.783.205.000
244	Kota Yogyakarta	3.107.422.900	21.584.843.060	33.011.768.000	51.489.189.000	51.489.189.000	51.489.189.000	187.479.335.000
245	Provinsi Jawa Timur							-
246	Kab. Bangkalan	24.904.646.799	8.874.731.919	66.012.781.000	49.982.866.000	49.982.866.000	49.982.866.000	215.961.379.000
247	Kab. Banyuwangi	16.167.448.296	54.037.468.051	47.669.261.000	85.539.281.000	85.539.281.000	85.539.281.000	304.287.104.000
248	Kab. Blitar	55.076.728.644	58.060.041.050	82.771.917.000	85.755.229.000	85.755.229.000	85.755.229.000	340.037.604.000
249	Kab. Bojonegoro	51.176.152.700	56.112.042.080	60.887.947.000	65.823.837.000	65.823.837.000	65.823.837.000	258.359.458.000
250	Kab. Bondowoso	18.474.620.200	19.761.646.520	39.796.052.000	41.083.079.000	41.083.079.000	41.083.079.000	163.045.289.000
251	Kab. Gresik	14.317.627.255	22.770.780.330	46.550.559.000	55.003.713.000	55.003.713.000	55.003.713.000	211.561.698.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 15 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
252	Kab. Jember	51.942.207.400	61.931.060.755	95.214.843.000	105.203.696.000	105.203.696.000	105.203.696.000	410.825.931.000
253	Kab. Jombang	-	6.673.673.670	65.631.089.000	72.304.763.000	72.304.763.000	72.304.763.000	282.545.378.000
254	Kab. Kediri	46.161.918.305	48.198.932.640	77.486.455.000	79.523.469.000	79.523.469.000	79.523.469.000	316.056.862.000
255	Kab. Lamongan	32.300.139.900	43.201.023.820	57.738.010.000	68.638.894.000	68.638.894.000	68.638.894.000	263.654.692.000
256	Kab. Lumajang	10.971.270.700	26.925.201.120	42.495.652.000	- 58.449.582.000	58.449.582.000	58.449.582.000	217.844.398.000
257	Kab. Madiun	21.626.457.360	25.966.927.078	47.818.616.000	52.159.085.000	52.159.085.000	52.159.085.000	204.295.871.000
258	Kab. Magetan	29.353.483.100	31.638.424.473	61.886.106.000	64.171.047.000	64.171.047.000	64.171.047.000	254.399.247.000
259	Kab. Malang	71.871.813.900	56.282.099.950	124.446.113.000	108.856.399.000	108.856.399.000	108.856.399.000	451.015.310.000
260	Kab. Mojokerto	16.104.955.700	21.071.726.100	54.253.209.000	59.219.979.000	59.219.979.000	59.219.979.000	231.913.146.000
261	Kab. Nganjuk	31.917.368.500	51.582.878.730	58.805.933.000	78.471.443.000	78.471.443.000	78.471.443.000	294.220.262.000
262	Kab. Ngawi	26.974.706.200	36.784.847.600	55.197.684.000	65.007.826.000	65.007.826.000	65.007.826.000	250.221.162.000
263	Kab. Pacitan	24.425.308.400	33.731.015.800	38.378.412.000	47.684.119.000	47.684.119.000	47.684.119.000	181.430.769.000
264	Kab. Pamekasan	22.709.789.200	8.860.713.660	55.116.175.000	41.267.099.000	41.267.099.000	41.267.099.000	178.917.472.000
265	Kab. Pasuruan	34.824.628.680	33.817.343.500	65.019.696.000	64.012.411.000	64.012.411.000	64.012.411.000	257.056.929.000
266	Kab. Ponorogo	28.933.763.700	43.722.507.480	52.431.942.000	67.220.686.000	67.220.686.000	67.220.686.000	254.094.000.000
267	Kab. Probolinggo	19.833.396.060	24.999.438.600	46.443.565.000	51.609.608.000	51.609.608.000	51.609.608.000	201.272.389.000
268	Kab. Sampang	6.896.468.300	12.756.173.188	26.474.816.000	32.334.521.000	32.334.521.000	32.334.521.000	123.478.379.000
269	Kab. Sidoarjo	35.651.251.000	45.627.464.660	81.191.571.000	91.167.784.000	91.167.784.000	91.167.784.000	354.694.923.000
270	Kab. Situbondo	15.567.930.000	16.561.251.660	36.372.646.000	37.365.968.000	37.365.968.000	37.365.968.000	148.470.550.000

u



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
271	Kab. Sumenep	18.214.872.100	27.569.088.087	36.065.379.000	45.419.595.000	45.419.595.000	45.419.595.000	172.324.164.000
272	Kab. Trenggalek	26.749.121.799	29.145.964.263	70.657.421.000	73.054.264.000	73.054.264.000	73.054.264.000	289.820.213.000
273	Kab. Tuban	35.715.332.273	9.240.298.674	91.897.224.000	65.422.190.000	65.422.190.000	65.422.190.000	288.163.794.000
274	Kab. Tulungagung	36.477.682.748	45.281.497.600	71.867.948.000	80.671.762.000	80.671.762.000	80.671.762.000	313.883.234.000
275	Kota Blitar	7.816.755.900	8.987.279.129	16.421.158.000	17.591.681.000	17.591.681.000	17.591.681.000	69.196.201.000
276	Kota Kediri	9.566.264.800	4.688.299.940	32.726.607.000	27.828.642.000	27.828.642.000	27.828.642.000	116.212.533.000
277	Kota Madiun	7.883.330.850	13.822.109.200	23.011.086.000	28.949.864.000	28.949.864.000	28.949.864.000	109.860.678.000
278	Kota Malang	10.890.926.880	25.810.640.630	36.373.029.000	51.292.743.000	51.292.743.000	51.292.743.000	190.251.258.000
279	Kota Mojokerto	5.245.392.840	6.362.834.415	11.473.083.000	12.590.524.000	12.590.524.000	12.590.524.000	49.244.655.000
280	Kota Pasuruan	3.046.566.000	4.647.774.300	13.002.564.000	14.603.772.000	14.603.772.000	14.603.772.000	56.813.880.000
281	Kota Probolinggo	5.422.974.020	7.788.392.920	19.740.756.000	22.106.174.000	22.106.174.000	22.106.174.000	86.059.278.000
282	Kota Surabaya	38.262.783.320	17.581.555.972	127.585.414.000	106.904.187.000	106.904.187.000	106.904.187.000	448.297.975.000
283	Kota Batu	2.478.953.800	1.908.669.200	14.013.696.000	13.443.412.000	13.443.412.000	13.443.412.000	54.343.932.000
284	Provinsi Kalimantan Barat							-
285	Kab. Bengkayang	4.635.053.300	6.246.910.155	8.043.858.000	9.655.715.000	9.655.715.000	9.655.715.000	37.011.003.000
286	Kab. Landak	5.150.428.400	4.419.890.000	16.036.559.000	15.306.021.000	15.306.021.000	15.306.021.000	61.954.622.000
287	Kab. Kapuas Hulu	3.445.868.600	5.303.198.936	11.155.313.000	13.012.643.000	13.012.643.000	13.012.643.000	50.193.242.000
288	Kab. Ketapang	6.833.920.500	9.938.130.440	13.268.315.000	16.372.525.000	16.372.525.000	16.372.525.000	62.385.890.000

4



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	(dalam rupiah)	
								JUMLAH	
289	Kab. Pontianak	7.423.601.300	8.090.686.284	23.060.627.000	23.727.712.000	23.727.712.000	23.727.712.000	94.243.763.000	
290	Kab. Sambas	13.455.604.609	14.769.873.700	26.908.773.000	28.223.042.000	28.223.042.000	28.223.042.000	111.577.899.000	
291	Kab. Sanggau	7.932.276.000	5.161.056.600	22.780.966.000	20.009.747.000	20.009.747.000	20.009.747.000	82.810.207.000	
292	Kab. Sintang	6.304.958.600	2.525.267.757	19.180.548.000	15.400.857.000	15.400.857.000	15.400.857.000	65.383.119.000	
293	Kota Pontianak	-	4.209.971.870	29.848.566.000	34.058.538.000	34.058.538.000	34.058.538.000	132.024.180.000	
294	Kota Singkawang	5.428.426.500	5.359.892.600	14.975.834.000	14.907.300.000	14.907.300.000	14.907.300.000	59.697.734.000	
295	Kab. Sekadau	9.640.871.000	2.914.520.730	14.974.472.000	8.248.121.000	8.248.121.000	8.248.121.000	39.718.835.000	
296	Kab. Melawi	-	11.559.792.760	-	1.181.481.000	6.529.903.000	6.529.903.000	14.241.287.000	
297	Kab. Kayong Utara	-	216.196.290	3.137.558.000	3.353.754.000	3.353.754.000	3.353.754.000	13.198.820.000	
298	Kab. Kubu Raya	9.181.661.058	8.615.635.952	23.860.611.000	23.294.586.000	23.294.586.000	23.294.586.000	93.744.369.000	
299	Provinsi Kalimantan Tengah								
300	Kab. Barito Selatan	6.438.673.100	6.716.542.300	10.961.818.000	11.239.687.000	11.239.687.000	11.239.687.000	44.680.879.000	
301	Kab. Barito Utara	2.473.748.460	3.255.948.840	8.661.793.000	9.443.994.000	9.443.994.000	9.443.994.000	36.993.775.000	
302	Kab. Kapuas	14.340.505.960	-	41.398.650.000	27.058.144.000	27.058.144.000	27.058.144.000	122.573.082.000	
303	Kab. Kotawaringin Barat	4.347.684.800	1.739.638.385	14.488.468.000	11.880.422.000	11.880.422.000	11.880.422.000	50.129.734.000	
304	Kab. Kotawaringin Timur	4.685.176.800	725.814.960	19.990.590.000	16.031.229.000	16.031.229.000	16.031.229.000	68.084.277.000	
305	Kota Palangkaraya	14.270.795.300	16.659.770.720	24.125.548.000	26.514.523.000	26.514.523.000	26.514.523.000	103.669.117.000	
306	Kab. Katingan	-	4.227.035.100	4.322.664.000	8.549.699.000	8.549.699.000	8.549.699.000	29.971.761.000	



LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
307	Kab. Seruyan	-	7.227.141.200	-	1.418.230.000	4.430.753.000	4.430.753.000	10.279.736.000
308	Kab. Sukamara	-	13.390.454.900	-	-	-	-	-
309	Kab. Lamandau	1.463.849.600	2.263.025.300	3.153.422.000	3.952.598.000	3.952.598.000	3.952.598.000	15.011.216.000
310	Kab. Gunung Mas	-	572.972.900	6.667.957.000	7.240.929.000	7.240.929.000	7.240.929.000	28.390.744.000
311	Kab. Pulang Pisau	13.389.336.500	2.299.787.200	22.621.626.000	11.532.077.000	11.532.077.000	11.532.077.000	57.217.857.000
312	Kab. Murung Raya	1.000.301.300	2.451.775.040	4.492.942.000	5.944.415.000	5.944.415.000	5.944.415.000	22.326.187.000
313	Kab. Barito Timur	8.491.869.910	3.991.216.691	14.270.645.000	9.769.992.000	9.769.992.000	9.769.992.000	43.580.621.000
314	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
315	Kab. Banjar	19.164.000	9.982.305.040	14.937.423.000	24.900.564.000	24.900.564.000	24.900.564.000	89.639.115.000
316	Kab. Barito Kuala	4.514.324.900	8.629.804.360	15.992.061.000	20.107.541.000	20.107.541.000	20.107.541.000	76.314.684.000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	9.255.986.680	12.918.284.400	14.637.075.000	18.299.372.000	18.299.372.000	18.299.372.000	69.535.191.000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	9.680.308.119	11.567.150.680	19.179.268.000	21.066.111.000	21.066.111.000	21.066.111.000	82.377.601.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara	6.652.956.100	9.120.574.900	13.385.913.000	15.853.532.000	15.853.532.000	15.853.532.000	60.946.509.000
320	Kab. Kotabaru	129.827.700	7.355.393.483	4.373.443.000	11.599.008.000	11.599.008.000	11.599.008.000	39.170.467.000
321	Kab. Tabalong	9.260.931.600	16.424.103.900	12.323.985.000	19.487.157.000	19.487.157.000	19.487.157.000	70.785.456.000
322	Kab. Tanah Laut	4.421.768.300	7.209.464.170	18.499.864.000	21.287.559.000	21.287.559.000	21.287.559.000	82.362.541.000
323	Kab. Tapin	6.550.096.000	11.051.828.020	8.825.982.000	13.327.714.000	13.327.714.000	13.327.714.000	48.809.124.000
324	Kota Banjarbaru	8.867.979.962	9.806.689.949	17.780.700.000	18.719.410.000	18.719.410.000	18.719.410.000	73.938.930.000



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	(dalam rupiah)				JUMLAH
				PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	
325	Kota Banjarmasin	19.214.300.300	30.786.871.625	37.981.294.000	49.553.866.000	49.553.866.000	49.553.866.000	186.642.892.000
326	Kab. Balangan	38.490.104	7.558.378.098	679.515.000	8.199.403.000	8.199.403.000	8.199.403.000	25.277.724.000
327	Kab. Tanah Bumbu	5.396.115.195	5.196.138.416	12.511.549.000	12.311.572.000	12.311.572.000	12.311.572.000	49.446.265.000
328	Provinsi Kalimantan Timur							-
329	Kab. Berau		2.695.014.610	6.448.698.000	9.143.713.000	9.143.713.000	9.143.713.000	33.879.837.000
330	Kab. Kutai Kartanegara	513.262.680	29.945.611.287	15.419.920.000	44.852.269.000	44.852.269.000	44.852.269.000	149.976.727.000
331	Kab. Kutai Barat	315.018.600	4.958.897.900	8.563.771.000	13.207.651.000	13.207.651.000	13.207.651.000	48.186.724.000
332	Kab. Kutai Timur	74.818.295	4.444.898.485	6.810.761.000	11.180.841.000	11.180.841.000	11.180.841.000	40.353.284.000
333	Kab. Paser	798.930.475	5.630.930.800	15.067.347.000	19.899.347.000	19.899.347.000	19.899.347.000	74.765.388.000
334	Kota Balikpapan	13.682.396.969	16.797.638.220	24.271.729.000	27.386.970.000	27.386.970.000	27.386.970.000	106.432.639.000
335	Kota Bontang	948.788.590	2.899.587.330	10.914.846.000	12.865.645.000	12.865.645.000	12.865.645.000	49.511.781.000
336	Kota Samarinda	18.994.629.000	11.847.723.066	50.862.524.000	43.715.618.000	43.715.618.000	43.715.618.000	182.009.378.000
337	Kab. Penajam Paser Utara	749.814.600	234.360.960	10.603.565.000	10.088.112.000	10.088.112.000	10.088.112.000	40.867.901.000
338	Kab. Mahakam Ulu			3.519.132.000	3.519.132.000	3.519.132.000	3.519.132.000	14.076.528.000
339	Provinsi Kalimantan Utara							-
340	Kab. Bulungan		871.927.517	9.850.165.000	10.722.092.000	10.722.092.000	10.722.092.000	42.016.441.000
341	Kab. Malinau	30.634.800	1.515.326.214	6.000.148.000	7.484.839.000	7.484.839.000	7.484.839.000	28.454.665.000

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 20 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
342	Kab. Nunukan	483.724.700	1.016.191.520	6.623.638.000	7.156.105.000	7.156.105.000	7.156.105.000	28.091.953.000
343	Kota Tarakan	-	(992.835.520)	21.343.295.000	20.350.460.000	20.350.460.000	20.350.460.000	82.394.675.000
344	Kab. Tana Tidung	-	362.099.600	9.473.503.000	9.835.602.000	9.835.602.000	9.835.602.000	38.980.309.000
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	4.277.531.130	3.688.001.118	14.784.471.000	14.194.941.000	14.194.941.000	14.194.941.000	57.369.294.000
347	Kab. Minahasa	16.171.715.992	18.977.870.600	33.710.198.000	36.516.353.000	36.516.353.000	36.516.353.000	143.259.257.000
348	Kab. Sangihe	4.855.899.818	6.156.933.362	12.847.779.000	14.148.813.000	14.148.813.000	14.148.813.000	55.294.218.000
349	Kota Bitung	46.555.200	4.112.469.245	9.935.543.000	14.001.457.000	14.001.457.000	14.001.457.000	51.939.914.000
350	Kota Manado	18.546.183.180	24.235.560.015	33.522.771.000	39.212.147.000	39.212.147.000	39.212.147.000	151.159.212.000
351	Kab. Kepulauan Talaud	5.399.384.800	6.395.686.478	15.309.455.000	16.305.757.000	16.305.757.000	16.305.757.000	64.226.726.000
352	Kab. Minahasa Selatan	12.921.750.240	14.286.319.160	22.393.467.000	23.758.036.000	23.758.036.000	23.758.036.000	93.667.575.000
353	Kota Tomohon	5.844.702.600	6.724.883.340	12.853.556.000	13.733.737.000	13.733.737.000	13.733.737.000	54.054.767.000
354	Kab. Minahasa Utara	157.684.900	16.865.845.800	-	16.224.381.000	16.877.928.000	16.877.928.000	49.980.237.000
355	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang B	2.592.502.433	3.679.071.135	9.658.884.000	10.745.053.000	10.745.053.000	10.745.053.000	41.894.043.000
356	Kota Kotamobagu	4.820.014.300	5.939.007.202	15.126.060.000	16.245.052.000	16.245.052.000	16.245.052.000	63.861.216.000
357	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.641.260.719	2.173.617.480	5.094.170.000	5.626.527.000	5.626.527.000	5.626.527.000	21.973.751.000
358	Kab. Minahasa Tenggara	12.968.956.109	5.451.169.265	18.292.037.000	10.774.250.000	10.774.250.000	10.774.250.000	50.614.787.000
359	Kab. Bolaang Mongondow Timur	951.084.000	2.731.713.640	2.510.651.000	4.291.280.000	4.291.280.000	4.291.280.000	15.384.491.000

9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 21 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
360	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.901.730.400	1.044.129.680	3.655.235.000	2.797.634.000	2.797.634.000	2.797.634.000	12.048.137.000
361	Provinsi Gorontalo							
362	Kab. Boalemo	7.504.000	3.531.206.610	6.694.922.000	10.218.625.000	10.218.625.000	10.218.625.000	37.350.797.000
363	Kab. Gorontalo	5.619.561.000	21.120.822.765	12.622.633.000	28.123.895.000	28.123.895.000	28.123.895.000	96.994.318.000
364	Kota Gorontalo	4.612.025.900	9.796.678.517	19.359.170.000	24.543.822.000	24.543.822.000	24.543.822.000	92.990.636.000
365	Kab. Pohuwato	-	2.338.817.300	10.687.683.000	13.026.500.000	13.026.500.000	13.026.500.000	49.767.183.000
366	Kab. Bone Bolango	-	7.566.276.787	13.773.401.000	21.339.677.000	21.339.677.000	21.339.677.000	77.792.432.000
367	Kab. Gorontalo Utara	23.458.800	3.061.700.913	7.005.491.000	10.043.734.000	10.043.734.000	10.043.734.000	37.136.693.000
368	Provinsi Sulawesi Tengah							
369	Kab. Banggai	5.625.269.400	10.552.586.669	21.126.633.000	26.053.950.000	26.053.950.000	26.053.950.000	99.288.483.000
370	Kab. Banggai Kepulauan	2.541.953.000	5.473.212.008	6.238.058.000	9.169.317.000	9.169.317.000	9.169.317.000	33.746.009.000
371	Kab. Buol	2.848.805.480	3.531.412.241	9.024.073.000	9.706.680.000	9.706.680.000	9.706.680.000	38.144.113.000
372	Kab. Toli-Toli	2.328.523.499	8.085.344.070	5.197.231.000	10.954.051.000	10.954.051.000	10.954.051.000	38.059.384.000
373	Kab. Donggala	1.687.343.800	5.473.765.900	15.681.117.000	19.467.539.000	19.467.539.000	19.467.539.000	74.083.734.000
374	Kab. Morowali	2.889.655.700	8.061.633.768	3.765.593.000	8.937.571.000	8.937.571.000	8.937.571.000	30.578.306.000
375	Kab. Poso	193.578.300	239.300	20.755.339.000	20.562.000.000	20.562.000.000	20.562.000.000	82.441.339.000
376	Kota Palu	-	381.138.404	33.306.231.000	33.687.369.000	33.687.369.000	33.687.369.000	134.368.338.000

9



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
								(dalam rupiah)
377	Kab. Parigi Moutong	4.130.066.460	4.712.929.388	16.835.308.000	17.418.171.000	17.418.171.000	17.418.171.000	69.089.821.000
378	Kab. Tojo Una Una	-	1.685.045.034	5.456.725.000	7.141.770.000	7.141.770.000	7.141.770.000	26.882.035.000
379	Kab. Sigi	7.216.589.500	5.651.134.980	16.190.195.000	14.624.741.000	14.624.741.000	14.624.741.000	60.064.418.000
380	Kab. Banggai Laut	-	-	4.764.963.000	4.764.963.000	4.764.963.000	4.764.963.000	19.059.852.000
381	Kab. Morowali Utara	-	-	6.477.476.000	6.477.476.000	6.477.476.000	6.477.476.000	25.909.904.000
382	Provinsi Sulawesi Selatan							-
383	Kab. Bantaeng	798.667.100	3.915.627.300	10.620.424.000	13.737.384.000	13.737.384.000	13.737.384.000	51.832.576.000
384	Kab. Barru	3.821.337.400	8.717.068.530	13.144.431.000	18.040.162.000	18.040.162.000	18.040.162.000	67.264.917.000
385	Kab. Bone	-	29.288.814.480	32.329.384.000	61.618.199.000	61.618.199.000	61.618.199.000	217.183.981.000
386	Kab. Bulukumba	14.111.728.624	20.149.541.632	30.123.821.000	36.161.634.000	36.161.634.000	36.161.634.000	138.608.723.000
387	Kab. Enrekang	4.352.787.860	7.892.279.830	21.227.987.000	24.767.479.000	24.767.479.000	24.767.479.000	95.530.424.000
388	Kab. Gowa	16.370.972.800	16.708.049.300	35.426.098.000	35.763.175.000	35.763.175.000	35.763.175.000	142.715.623.000
389	Kab. Jeneponto	4.803.664.260	8.843.205.178	15.708.642.000	19.748.183.000	19.748.183.000	19.748.183.000	74.953.191.000
390	Kab. Luwu	5.925.777.360	20.130.570.930	9.319.983.000	23.524.776.000	23.524.776.000	23.524.776.000	79.894.311.000
391	Kab. Luwu Utara	2.758.250.200	5.018.313.466	15.520.777.000	17.780.840.000	17.780.840.000	17.780.840.000	68.863.297.000
392	Kab. Maros	73.522.800	25.166.791.903	2.400.970.000	27.494.239.000	27.494.239.000	27.494.239.000	84.883.687.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	7.115.138.600	13.033.297.780	19.279.857.000	25.198.016.000	25.198.016.000	25.198.016.000	94.873.905.000
394	Kota Palopo	4.910.401.100	5.668.002.335	17.205.402.000	17.963.003.000	17.963.003.000	17.963.003.000	71.094.411.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 23 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
395	Kab. Luwu Timur	-	7.290.838.124	10.483.257.000	17.774.095.000	17.774.095.000	17.774.095.000	63.805.542.000
396	Kab. Pinrang	5.298.494.700	9.945.619.130	24.607.583.000	29.254.707.000	29.254.707.000	29.254.707.000	112.371.704.000
397	Kab. Sinjai	4.392.437.890	7.072.870.450	23.072.713.000	25.753.146.000	25.753.146.000	25.753.146.000	100.392.151.000
398	Kab. Kepulauan Selayar	2.622.003.800	4.193.198.170	14.665.602.000	16.236.797.000	16.236.797.000	16.236.797.000	63.375.993.000
399	Kab. Sidenreng Rappang	-	3.185.528.920	- 21.452.003.000	24.637.532.000	24.637.532.000	24.637.532.000	95.364.599.000
400	Kab. Soppeng	-	1.828.368.668	25.226.845.000	27.055.213.000	27.055.213.000	27.055.213.000	106.392.484.000
401	Kab. Takalar	10.212.241.500	11.076.566.033	22.858.806.000	23.723.131.000	23.723.131.000	23.723.131.000	94.028.199.000
402	Kab. Tana Toraja	1.399.662.271	4.950.118.259	16.027.560.000	19.578.016.000	19.578.016.000	19.578.016.000	74.761.608.000
403	Kab. Wajo	-	6.637.448.292	27.603.090.000	34.240.538.000	34.240.538.000	34.240.538.000	130.324.704.000
404	Kota Pare-pare	-	824.333.120	24.953.823.000	25.778.156.000	25.778.156.000	25.778.156.000	102.288.291.000
405	Kota Makassar	36.503.490.714	43.763.676.280	73.762.207.000	81.022.392.000	81.022.392.000	81.022.392.000	316.829.383.000
406	Kab. Toraja Utara	12.491.966.740	5.296.148.110	27.886.824.000	20.691.005.000	20.691.005.000	20.691.005.000	89.959.839.000
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
408	Kab. Majene	2.144.835.037	4.825.307.733	12.927.628.000	15.608.101.000	15.608.101.000	15.608.101.000	59.751.931.000
409	Kab. Mamuju	48.278.400	527.794.294	18.435.947.000	18.915.462.000	18.915.462.000	18.915.462.000	75.182.333.000
410	Kab. Polewali Mandar	142.065.145	10.929.890.050	21.322.480.000	32.110.305.000	32.110.305.000	32.110.305.000	117.653.395.000
411	Kab. Mamasa	289.226.700	4.005.281.193	12.790.916.000	16.506.970.000	16.506.970.000	16.506.970.000	62.311.826.000
412	Kab. Mamuju Utara	-	2.226.907.532	5.863.297.000	8.090.204.000	8.090.204.000	8.090.204.000	30.133.909.000

64



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
413	Kab. Mamuju Tengah	-	-	6.599.373.000	6.599.373.000	6.599.373.000	6.599.373.000	26.397.492.000
414	Provinsi Sulawesi Tenggara							-
415	Kab. Buton	12.325.049.000	12.249.373.966	22.862.295.000	22.786.620.000	22.786.620.000	22.786.620.000	91.222.155.000
416	Kab. Konawe	3.365.873.600	6.049.827.393	18.311.130.000	20.995.084.000	20.995.084.000	20.995.084.000	81.296.382.000
417	Kab. Kolaka	-	9.124.225.031	9.922.444.000	19.046.669.000	19.046.669.000	19.046.669.000	67.062.451.000
418	Kab. Muna	13.572.765.300	11.236.578.082	34.254.324.000	31.918.137.000	31.918.137.000	31.918.137.000	130.008.735.000
419	Kota Kendari	9.962.530.800	12.410.122.036	25.440.957.000	27.888.449.000	27.888.449.000	27.888.449.000	109.106.304.000
420	Kota Baubau	3.879.326.500	5.543.306.180	20.469.451.000	22.133.430.000	22.133.430.000	22.133.430.000	86.869.741.000
421	Kab. Konawe Selatan	3.395.127.300	8.242.198.980	11.456.789.000	16.303.860.000	16.303.860.000	16.303.860.000	60.368.369.000
422	Kab. Bombana	159.688.800	6.299.975.280	5.219.541.000	11.359.827.000	11.359.827.000	11.359.827.000	39.299.022.000
423	Kab. Wakatobi	6.828.847.353	4.075.478.940	12.446.465.000	9.693.097.000	9.693.097.000	9.693.097.000	41.525.756.000
424	Kab. Kolaka Utara	-	6.762.635.615	4.026.674.000	10.789.309.000	10.789.309.000	10.789.309.000	36.394.601.000
425	Kab. Konawe Utara	657.905.800	1.673.743.490	3.900.215.000	4.916.053.000	4.916.053.000	4.916.053.000	18.648.374.000
426	Kab. Buton Utara	4.782.400	1.100.304.749	4.767.263.000	5.862.786.000	5.862.786.000	5.862.786.000	22.355.521.000
427	Kab. Kolaka Timur	-	-	5.907.615.000	5.907.615.000	5.907.615.000	5.907.615.000	23.630.460.000
428	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	3.529.401.000	3.529.401.000	3.529.401.000	3.529.401.000	14.117.604.000
429	Provinsi Bali							-

67



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
430	Kab. Badung	13.509.245.042	15.608.896.914	31.054.268.000	33.153.920.000	33.153.920.000	33.153.920.000	130.516.028.000
431	Kab. Bangli	4.531.624.600	7.079.743.400	15.612.539.000	18.160.658.000	18.160.658.000	18.160.658.000	70.094.513.000
432	Kab. Buleleng	22.413.867.000	30.994.385.560	48.062.355.000	56.642.873.000	56.642.873.000	56.642.873.000	217.990.974.000
433	Kab. Gianyar	13.159.506.400	25.920.644.920	29.708.597.000	42.469.735.000	42.469.735.000	42.469.735.000	157.117.802.000
434	Kab. Jembrana	6.292.575.500	12.732.135.640	18.897.031.000	25.336.591.000	25.336.591.000	25.336.591.000	94.906.804.000
435	Kab. Karangasem	11.512.221.200	11.679.009.595	34.643.101.000	34.809.890.000	34.809.890.000	34.809.890.000	139.072.771.000
436	Kab. Klungkung	12.013.041.000	11.183.084.404	22.790.909.000	21.960.952.000	21.960.952.000	21.960.952.000	88.673.765.000
437	Kab. Tabanan	16.331.068.100	31.441.360.675	28.097.700.000	43.207.992.000	43.207.992.000	43.207.992.000	157.721.676.000
438	Kota Denpasar	38.539.228.500	21.450.815.480	58.344.043.000	41.255.630.000	41.255.630.000	41.255.630.000	182.110.933.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Barat							-
440	Kab. Bima							-
441	Kab. Dompu	938.370.600	7.067.021.295	28.620.845.000	34.749.496.000	34.749.496.000	34.749.496.000	132.869.333.000
442	Kab. Lombok Barat	7.003.525.700	5.420.400.100	18.871.046.000	17.287.920.000	17.287.920.000	17.287.920.000	70.734.806.000
443	Kab. Lombok Tengah	12.106.923.600	19.086.811.860	24.895.806.000	31.875.694.000	31.875.694.000	31.875.694.000	120.522.888.000
444	Kab. Lombok Timur	25.739.248.960	19.402.109.638	49.334.237.000	42.997.098.000	42.997.098.000	42.997.098.000	178.325.531.000
445	Kab. Sumbawa	20.202.256.360	16.198.568.240	57.702.565.000	53.698.877.000	53.698.877.000	53.698.877.000	218.799.196.000
446	Kota Mataram	12.218.290.700	16.116.831.980	25.856.312.000	29.754.853.000	29.754.853.000	29.754.853.000	115.120.871.000
447	Kota Bima	13.697.236.500	12.508.585.700	30.744.850.000	29.556.200.000	29.556.200.000	29.556.200.000	119.413.450.000
		8.352.503.300	12.024.225.270	16.769.763.000	20.441.485.000	20.441.485.000	20.441.485.000	78.094.218.000

4



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
448	Kab. Sumbawa Barat	1.411.640.300	5.348.643.125	5.571.741.000	9.508.744.000	9.508.744.000	9.508.744.000	34.097.973.000
449	Kab. Lombok Utara	1.935.336.600	1.824.808.051	11.334.293.000	11.223.765.000	11.223.765.000	11.223.765.000	45.005.588.000
450	Provinsi Nusa Tenggara Timur							
451	Kab. Alor	3.233.895.000	3.774.904.860	11.378.222.000	11.919.231.000	11.919.231.000	11.919.231.000	47.135.915.000
452	Kab. Belu	12.296.664.400	6.893.709.790	14.866.131.000	9.463.177.000	9.463.177.000	9.463.177.000	43.255.662.000
453	Kab. Ende	8.678.467.922	5.524.811.985	23.519.413.000	20.365.757.000	20.365.757.000	20.365.757.000	84.616.684.000
454	Kab. Flores Timur	10.319.192.600	7.241.652.012	20.111.464.000	17.033.923.000	17.033.923.000	17.033.923.000	71.213.233.000
455	Kab. Kupang	10.531.482.528	9.234.947.546	20.031.325.000	18.734.790.000	18.734.790.000	18.734.790.000	76.235.695.000
456	Kab. Lembata	1.271.422.591	3.225.323.865	9.986.936.000	11.940.838.000	11.940.838.000	11.940.838.000	45.809.450.000
457	Kab. Manggarai	5.398.335.800	6.628.112.655	12.912.866.000	14.142.643.000	14.142.643.000	14.142.643.000	55.340.795.000
458	Kab. Ngada	3.563.169.700	3.943.216.140	8.775.358.000	9.155.405.000	9.155.405.000	9.155.405.000	36.241.573.000
459	Kab. Sikka	12.161.669.050	7.146.797.023	23.737.203.000	18.722.331.000	18.722.331.000	18.722.331.000	79.904.196.000
460	Kab. Sumba Barat	2.561.006.260	1.010.490.500	11.213.688.000	9.663.173.000	9.663.173.000	9.663.173.000	40.203.207.000
461	Kab. Sumba Timur	5.510.220.400	6.297.977.435	12.638.868.000	13.426.625.000	13.426.625.000	13.426.625.000	52.918.743.000
462	Kab. Timor Tengah Selatan	10.216.132.972	8.003.985.179	21.786.419.000	19.574.271.000	19.574.271.000	19.574.271.000	80.509.232.000
463	Kab. Timor Tengah Utara	6.234.265.420	4.784.093.260	12.818.559.000	11.368.387.000	11.368.387.000	11.368.387.000	46.923.720.000
464	Kota Kupang	15.144.007.184	14.700.321.596	32.212.210.000	31.768.524.000	31.768.524.000	31.768.524.000	127.517.782.000
465	Kab. Rote Ndao	-	-	8.666.248.000	8.666.248.000	8.666.248.000	8.666.248.000	34.664.992.000

(dalam rupiah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

- 27 -
**RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
								(dalam rupiah)
466	Kab. Manggarai Barat	6.458.311.388	736.404.336	28.084.762.000	22.362.855.000	22.362.855.000	22.362.855.000	95.173.327.000
467	Kab. Nagekeo	5.504.573.400	5.163.872.760	11.865.050.000	11.524.349.000	11.524.349.000	11.524.349.000	46.438.097.000
468	Kab. Sumba Barat Daya	4.793.571.300	3.646.010.640	10.501.657.000	9.354.097.000	9.354.097.000	9.354.097.000	38.563.948.000
469	Kab. Sumba Tengah	90.888.000	1.766.750.040	2.023.158.000	3.699.020.000	3.699.020.000	3.699.020.000	13.120.218.000
470	Kab. Manggarai Timur	7.253.518.760	(947.498.569)	18.980.381.000	10.779.363.000	10.779.363.000	10.779.363.000	51.318.470.000
471	Kab. Sabu Raijua	272.539.398	244.976.292	3.821.409.000	3.793.846.000	3.793.846.000	3.793.846.000	15.202.947.000
472	Kab. Malaka	-	-	12.525.738.000	12.525.738.000	12.525.738.000	12.525.738.000	50.102.952.000
473	Provinsi Maluku							-
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.683.959.857	4.983.974.942	8.018.712.000	11.318.727.000	11.318.727.000	11.318.727.000	41.974.893.000
475	Kab. Maluku Tengah	95.227.844	19.481.188.404	2.643.228.000	22.029.188.000	22.029.188.000	22.029.188.000	68.730.792.000
476	Kab. Maluku Tenggara	1.879.631.680	3.792.386.599	6.379.211.000	8.291.966.000	8.291.966.000	8.291.966.000	31.255.109.000
477	Kab. Pulau Buru	66.546.600	3.079.736.820	3.932.807.000	6.945.997.000	6.945.997.000	6.945.997.000	24.770.798.000
478	Kota Ambon	166.054.840	828.216.280	31.832.297.000	32.494.458.000	32.494.458.000	32.494.458.000	129.315.671.000
479	Kab. Seram Bagian Barat	-	6.358.625.222	3.181.549.000	9.540.174.000	9.540.174.000	9.540.174.000	31.802.071.000
480	Kab. Seram Bagian Timur	-	1.707.355.880	2.031.108.000	3.738.464.000	3.738.464.000	3.738.464.000	13.246.500.000
481	Kab. Kepulauan Aru	-	119.585.300	3.616.119.000	3.735.704.000	3.735.704.000	3.735.704.000	14.823.231.000
482	Kota Tual	1.242.805.800	2.086.856.940	6.239.993.000	7.084.045.000	7.084.045.000	7.084.045.000	27.492.128.000
483	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	4.994.508.000	4.994.508.000	4.994.508.000	4.994.508.000	19.978.032.000

6



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
484	Kab. Buru Selatan	110.804.800	909.468.420	3.374.937.000	4.173.601.000	4.173.601.000	4.173.601.000	15.895.740.000
485	Provinsi Maluku Utara							-
486	Kab. Halmahera Tengah	931.964.852	1.752.002.659	5.300.752.000	6.120.789.000	6.120.789.000	6.120.789.000	23.663.119.000
487	Kota Ternate	2.925.329.400	7.251.815.122	17.449.288.000	21.775.774.000	21.775.774.000	21.775.774.000	82.776.610.000
488	Kab. Halmahera Barat	10.391.319.525	7.646.903.300	12.861.433.000	10.117.017.000	10.117.017.000	10.117.017.000	43.212.484.000
489	Kab. Halmahera Timur	264.601.200	1.983.063.180	7.292.092.000	9.010.554.000	9.010.554.000	9.010.554.000	34.323.754.000
490	Kab. Halmahera Selatan	4.192.120.500	1.043.146.507	11.635.997.000	8.487.023.000	8.487.023.000	8.487.023.000	37.097.066.000
491	Kab. Halmahera Utara	518.176.400	2.996.970.830	6.677.700.000	9.156.494.000	9.156.494.000	9.156.494.000	34.147.182.000
492	Kab. Kepulauan Sula	4.202.692.090	1.096.364.546	14.512.747.000	11.406.419.000	11.406.419.000	11.406.419.000	48.732.004.000
493	Kota Tidore Kepulauan	4.417.838.500	7.060.483.259	7.719.605.000	10.362.250.000	10.362.250.000	10.362.250.000	38.806.355.000
494	Kab. Pulau Morotai	555.643.320	1.646.913.980	1.895.310.000	2.986.581.000	2.986.581.000	2.986.581.000	10.855.053.000
495	Kab. Pulau Taliabu	-	-	4.765.710.000	4.765.710.000	4.765.710.000	4.765.710.000	19.062.840.000
496	Provinsi Papua							-
497	Kab. Biak Numfor	3.877.653.100	4.204.554.020	8.403.892.000	8.730.793.000	8.730.793.000	8.730.793.000	34.596.271.000
498	Kab. Jayapura	489.154.000	3.401.778.160	9.865.523.000	12.778.147.000	12.778.147.000	12.778.147.000	48.199.964.000
499	Kab. Jayawijaya	-	-	12.501.920.000	12.501.920.000	12.501.920.000	12.501.920.000	50.007.680.000
500	Kab. Merauke	690.699.380	6.454.262.300	8.009.106.000	13.772.669.000	13.772.669.000	13.772.669.000	49.327.113.000



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
501	Kab. Mimika	-	-	7.792.729.000	7.792.729.000	7.792.729.000	7.792.729.000	31.170.916.000
502	Kab. Nabire	5.746.902.500	2.743.478.110	13.789.105.000	10.785.680.000	10.785.680.000	10.785.680.000	46.146.145.000
503	Kab. Paniai	-	4.681.374.120	-	643.547.000	2.729.022.000	2.729.022.000	6.101.591.000
504	Kab. Puncak Jaya	-	-	4.080.967.000	4.080.967.000	4.080.967.000	4.080.967.000	16.323.868.000
505	Kab. Kepulauan Yapen	(51.840.000)	2.602.656.340	4.511.499.000	7.165.996.000	7.165.996.000	7.165.996.000	26.009.487.000
506	Kota Jayapura	1.690.600.200	637.849.042	28.467.249.000	27.414.498.000	27.414.498.000	27.414.498.000	110.710.743.000
507	Kab. Sarmi	-	-	2.748.778.000	2.748.778.000	2.748.778.000	2.748.778.000	10.995.112.000
508	Kab. Keerom	1.842.836.100	1.448.210.698	6.006.512.000	5.611.886.000	5.611.886.000	5.611.886.000	22.842.170.000
509	Kab. Yahukimo	-	-	3.306.403.000	3.306.403.000	3.306.403.000	3.306.403.000	13.225.612.000
510	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	3.201.144.000	3.201.144.000	3.201.144.000	3.201.144.000	12.804.576.000
511	Kab. Tolikara	-	-	2.660.820.000	2.660.820.000	2.660.820.000	2.660.820.000	10.643.280.000
512	Kab. Boven Digoel	-	-	3.142.410.000	3.142.410.000	3.142.410.000	3.142.410.000	12.569.640.000
513	Kab. Mappi	745.601.996	342.038.926	12.165.780.000	11.762.217.000	11.762.217.000	11.762.217.000	47.452.431.000
514	Kab. Asmat	-	-	3.849.199.000	3.849.199.000	3.849.199.000	3.849.199.000	15.396.796.000
515	Kab. Waropen	-	-	5.963.870.000	5.963.870.000	5.963.870.000	5.963.870.000	23.855.480.000
516	Kab. Supiori	-	-	9.810.961.000	9.810.961.000	9.810.961.000	9.810.961.000	39.243.844.000
517	Kab. Mamberamo Raya	-	-	2.951.947.000	2.951.947.000	2.951.947.000	2.951.947.000	11.807.788.000
518	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	10.488.355.000	10.488.355.000	10.488.355.000	10.488.355.000	41.953.420.000
519	Kab. Yalimo	-	-	6.615.752.000	6.615.752.000	6.615.752.000	6.615.752.000	26.463.008.000

5



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
520	Kab. Lanny Jaya	-	-	17.846.794.000	17.846.794.000	17.846.794.000	17.846.794.000	71.387.176.000
521	Kab. Nduga	-	-	3.376.790.000	3.376.790.000	3.376.790.000	3.376.790.000	13.507.160.000
522	Kab. Dogiyai	-	-	6.069.727.000	6.069.727.000	6.069.727.000	6.069.727.000	24.278.908.000
523	Kab. Puncak	-	-	4.019.008.000	4.019.008.000	4.019.008.000	4.019.008.000	16.076.032.000
524	Kab. Intan Jaya	-	-	2.776.093.000	2.776.093.000	2.776.093.000	2.776.093.000	11.104.372.000
525	Kab. Deiyai	-	-	3.776.492.000	3.776.492.000	3.776.492.000	3.776.492.000	15.105.968.000
526	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
527	Kab. Fak Fak	1.511.192.450	911.459.000	8.803.859.000	8.204.126.000	8.204.126.000	8.204.126.000	33.416.237.000
528	Kab. Manokwari	-	1.388.970.200	8.978.284.000	10.367.254.000	10.367.254.000	10.367.254.000	40.080.046.000
529	Kab. Sorong	1.724.114.700	2.050.263.380	15.243.663.000	15.569.812.000	15.569.812.000	15.569.812.000	61.953.099.000
530	Kota Sorong	1.949.233.700	3.019.134.100	14.272.971.000	15.342.872.000	15.342.872.000	15.342.872.000	60.301.587.000
531	Kab. Raja Ampat	183.124.700	(258.194.720)	4.133.232.000	3.691.912.000	3.691.912.000	3.691.912.000	15.208.968.000
532	Kab. Sorong Selatan	578.427.000	1.168.572.940	9.764.837.000	10.354.983.000	10.354.983.000	10.354.983.000	40.829.786.000
533	Kab. Teluk Bintuni	-	182.496.360	5.640.751.000	5.823.248.000	5.823.248.000	5.823.248.000	23.110.495.000
534	Kab. Teluk Wondama	23.172.300	470.034.200	5.559.543.000	6.006.405.000	6.006.405.000	6.006.405.000	23.578.758.000
535	Kab. Kaimana	10.501.200	1.241.684.910	18.191.058.000	19.422.242.000	19.422.242.000	19.422.242.000	76.457.784.000
536	Kab. Maybrat	589.860.160	(434.191.200)	6.477.959.000	5.453.908.000	5.453.908.000	5.453.908.000	22.839.683.000
537	Kab. Tambora	35.973.400	(61.357.800)	1.559.075.000	1.461.744.000	1.461.744.000	1.461.744.000	5.944.307.000



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 61 /PMK.07/2014 TENTANG PEDOMAN
UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -
RINCIAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	DAERAH	KEKURANGAN PEMBAYARAN TP GURU PNSD	SISA DANA TP GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH	PENYALURAN TRIWULAN I	PENYALURAN TRIWULAN II	PENYALURAN TRIWULAN III	PENYALURAN TRIWULAN IV	JUMLAH
538	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	14.231.905.000	14.231.905.000	14.231.905.000	14.231.905.000	56.927.620.000
539	Kab. Manokwari Selatan	-	-	2.266.385.000	2.266.385.000	2.266.385.000	2.266.385.000	9.065.540.000
TOTAL PROVINSI		163.082.365.755	219.070.077.705	401.378.716.000	457.366.428.000	457.366.428.000	457.366.428.000	1.773.478.000.000
TOTAL KABUPATEN/KOTA		4.147.664.999.655	5.849.581.278.075	12.353.431.292.000	13.988.760.454.000	14.008.005.394.000	14.012.641.411.000	54.362.838.551.000
TOTAL NASIONAL		4.310.747.365.410	6.068.651.355.780	12.754.810.008.000	14.446.126.882.000	14.465.371.822.000	14.470.007.839.000	56.136.316.551.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Handwritten signature

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61 /PMK.07/2014
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN
PROFESI GURU PNSD KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN,
DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK DAN TELAH MENERIMA
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014

JENJANG PENDIDIKAN		BULAN : JANUARI 2014		BULAN : FEBRUARI 2014		BULAN : MARET 2014		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
		JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(a)	TK	(c)	(b)	(d)	(b)	(e)	(b)	(b) = (c)+(d)+(e)	Transfer Dana dari Pusat Rp (a)
	SD								Realisasi Pembayaran Rp (b)
	SMP								Sisa Lebih / (kurang) Rp (c) = (a - b)*
	SLB								
	SMA								
	SMK								
	Pengawas								dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
	JUMLAH							Σ Rp (b)	

JENJANG PENDIDIKAN		BULAN : APRIL 2014		BULAN : MEI 2014		BULAN : JUNI 2014		TOTAL REALISASI PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
		JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU PENERIMA	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)		
(a)	TK	(c)	(b)	(d)	(b)	(e)	(b)	(b) = (c)+(d)+(e)	Transfer Dana dari Pusat Rp (d)
	SD								Sisa Lebih / (kurang) Triwulan I Rp (c)
	SMP								Realisasi Pembayaran Rp (e)
	SLB								Sisa Lebih / (kurang) Rp (f) = (d+c-e)
	SMA								dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
	SMK								
	Pengawas								
	JUMLAH							Σ Rp (e)	

Keterangan :

1. (a) dan (d) adalah jumlah dana yang ditransfer pada Triwulan I dan II

2. Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).

3. Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

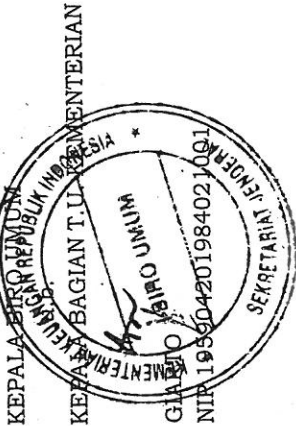
Tempat
Kepala Daerah
ttd
Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH GURU PNSD YANG BERHAK NAMUN BELUM MENERIMA
PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SEMESTER PERTAMA TA. 2014

TRIWULAN I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI 2014		BULAN : FEBRUARI 2014		BULAN : MARET 2014		TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN I (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
Pengawas								
JUMLAH							Σ Rp	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting

TRIWULAN II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL 2014		BULAN : MEI 2014		BULAN : JUNI 2014		TOTAL KEKURANGAN PEMBAYARAN TRIWULAN II (Rp)	KETERANGAN
	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH GURU YG BELUM DIBAYAR	KEKURANGAN PEMBAYARAN (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(5)+(7)	
TK								
SD								
SMP								
SLB								
SMA								
SMK								
Pengawas								
JUMLAH							Σ Rp	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting

Keterangan:

- Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
- Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat,

Kepala Daerah

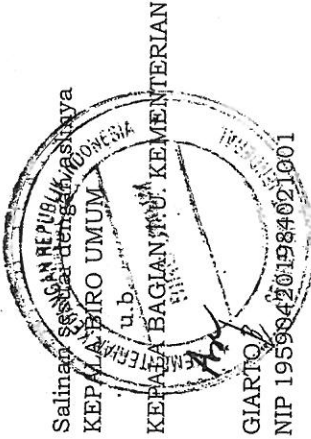
ttd

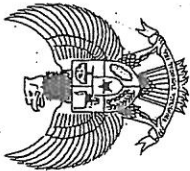
Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD SEMESTER I TA. 2014
BESERTA PENJELASAN KELEBIHAN/KEKURANGAN DANA *)

Provinsi/Kab/Kota:

PENYALURAN KE KAS DAERAH		REALISASI PEMBAYARAN OLEH KAS DAERAH **)		SISA DANA (5) = (1)+(2) - (3)+(4)	POTONGAN PPh Psl. 21		KEKURANGAN PEMBAYARAN (jika ada) ***)	
TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN I	TRIWULAN II		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN I	TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

Keterangan:

- *) coret yang tidak perlu
**) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 1 (Format Realisasi Pembayaran)
***) jumlahnya sama dengan kolom (8) pada FORM 2 (Format Kekurangan Pembayaran)
1. Format laporan tersebut diatas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).
2. Format laporan Semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya.

Tempat,

Kepala Daerah

ttd

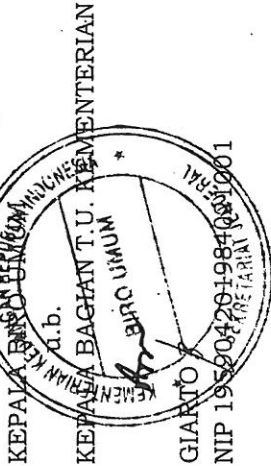
Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERHITUNGAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD DI REKENING KAS UMUM DAERAH
(REKAPITULASI SISA DANA)

Provinsi/Kab/Kota:

NO	TAHUN	ALOKASI SESUAI PMK	REALISASI*	KEBUTUHAN PEMBAYARAN**	SALDO***	KURANG/LEBIH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4)	(7) = (5) - (3)	(8)
1	2010						
2	2011						
3	2012						
4	2013						
5	2014						dapat ditambahkan keterangan yang dianggap penting

Keterangan:

*) Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD sampai dengan Triwulan Keempat

**) Jumlah kebutuhan pendanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD selama 1 (satu) tahun.

***) Jumlah sisa dana setelah pembayaran Triwulan Keempat yang masih disimpan di Kas Umum Daerah.

Tempat,

Kepala Daerah

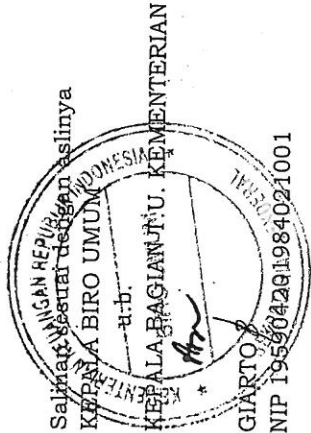
ttid

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI





MENTERI KEUANGAN,
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RENCANA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL
ATAS TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TAHUN 2014

Provinsi/Kab/Kota:

NO.	BULAN	JUMLAH GURU PNSD		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	Tarif PPh Ps. 21	PEMOTONGAN PPh Ps. 21	KETERANGAN
		Golongan	Jumlah Guru				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8)
1.	JANUARI	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	dapat ditambahkan keterangan lain yang dianggap penting
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
2.	FEBRUARI	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
3.	MARET	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
...	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	
12.	DESEMBER	Gol. III		Rp.....	5%	Rp.....	
		Gol. IV		Rp.....	15%	Rp.....	
	JUMLAH			Σ Rp.....		Σ Rp.....	

Keterangan:

Format laporan tersebut diatas adalah untuk laporan perkiraan pemotongan Pajak PPh Ps. 21 Tahun 2014

Tempat,

Kepala Daerah

td

Nama Jelas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan resmi yang telah ditandatangani
KEPALA BUREAU UMUM KEMENTERIAN
d.b.
KEPADA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BUREAU UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021607